**Demokrasi dan Pemerintahan**

**Demokrasi** adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang.

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari [bahasa Yunani](http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani) δημοκρατία – (*dēmokratía*) "kekuasaan rakyat", yang dibentuk dari kata δῆμος (*dêmos*) "rakyat" dan κράτος (*Kratos*) "kekuasaan", merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di [negara kota](http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_kota) [Yunani Kuno](http://id.wikipedia.org/wiki/Yunani_Kuno), khususnya [Athena](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Athena), menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM.

Berbicara mengenai demokrasi adalah [memburaskan](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Memburaskan&action=edit&redlink=1) (memperbincangkan) tentang [kekuasaan](http://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan), atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara [beradab](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Beradab&action=edit&redlink=1).Ia adalah [sistem manajemen](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_manajemen&action=edit&redlink=1) kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan [etika](http://id.wikipedia.org/wiki/Etika) serta peradaban yang menghargai [martabat](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Martabat&action=edit&redlink=1) manusia.[Pelaku](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelaku&action=edit&redlink=1) utama demokrasi adalah kita semua, setiap orang yang selama ini selalu diatasnamakan namun tak pernah ikut menentukan.Menjaga proses [demokratisasi](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Demokratisasi&action=edit&redlink=1) adalah memahami secara benar [hak](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak)-hak yang kita miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan siapapun yang berusaha [melanggar](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Melanggar&action=edit&redlink=1) hak-hak itu.Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang ([people rule](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=People_rule&action=edit&redlink=1)), dan di dalam sistem politik yang [demokratis](http://id.wikipedia.org/wiki/Demokratis) warga mempunyai hak, kesempatan dan [suara](http://id.wikipedia.org/wiki/Suara) yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia [publik](http://id.wikipedia.org/wiki/Publik).Sedang demokrasi adalah keputusan berdasarkan [suara](http://id.wikipedia.org/wiki/Suara) terbanyak. Di Indonesia, [pergerakan nasional](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pergerakan_nasional&action=edit&redlink=1) juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak [anti](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anti&action=edit&redlink=1)-[feodalisme](http://id.wikipedia.org/wiki/Feodalisme) dan anti-[imperialisme](http://id.wikipedia.org/wiki/Imperialisme), dengan tujuan membentuk masyarakat [sosialis](http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialis).Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah [keadilan](http://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan), dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga [otonomi](http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi) atau [kemandirian](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kemandirian&action=edit&redlink=1) dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia ingini.Jadi masalah keadilan menjadi penting, dalam arti dia mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi harus dihormati haknya dan harus diberi peluang dan kemudahan serta pertolongan untuk mencapai itu.

**Prinsip-prinsip demokrasi**

Setiap prinsip demokrasi dan [prasyarat](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prasyarat&action=edit&redlink=1) dari berdirinya negara demokrasi telah [terakomodasi](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Terakomodasi&action=edit&redlink=1) dalam suatu [konstitusi](http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi) Negara Kesatuan Republik Indonesia.Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat **Almadudi** yang kemudian dikenal dengan "[soko](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Soko&action=edit&redlink=1) guru demokrasi. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:

1. [Kedaulatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Kedaulatan) rakyat;
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
3. Kekuasaan [mayoritas](http://id.wikipedia.org/wiki/Mayoritas);
4. Hak-hak [minoritas](http://id.wikipedia.org/wiki/Minoritas);
5. [Jaminan](http://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan) hak asasi manusia;
6. Pemilihan yang bebas dan jujur;
7. Persamaan di depan [hukum](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum);
8. Proses hukum yang [wajar](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wajar&action=edit&redlink=1);
9. Pembatasan pemerintah secara [konstitusional](http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusional);
10. [Pluralisme](http://id.wikipedia.org/wiki/Pluralisme) sosial, [ekonomi](http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi), dan [politik](http://id.wikipedia.org/wiki/Politik),
11. Nilai-nilai [tolerensi](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tolerensi&action=edit&redlink=1), [pragmatisme](http://id.wikipedia.org/wiki/Pragmatisme), kerja sama, dan [mufakat](http://id.wikipedia.org/wiki/Mufakat).

 **Asas pokok demokrasi**

[Gagasan](http://id.wikipedia.org/wiki/Gagasan) pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan [hakikat](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hakikat&action=edit&redlink=1) manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam [hubungan sosial](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hubungan_sosial&action=edit&redlink=1). Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat 2 (dua) asas pokok demokrasi, yaitu:

1. Pengakuan [partisipasi](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Partisipasi&action=edit&redlink=1) rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, [umum](http://id.wikipedia.org/wiki/Umum), [bebas](http://id.wikipedia.org/wiki/Bebas), dan [rahasia](http://id.wikipedia.org/wiki/Rahasia) serta [jurdil](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jurdil&action=edit&redlink=1); dan
2. Pengakuan hakikat dan [martabat manusia](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Martabat_manusia&action=edit&redlink=1), misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak [asasi](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asasi&action=edit&redlink=1) manusia demi kepentingan bersama.

 **Ciri-ciri pemerintahan demokratis**

Istilah demokrasi diperkenalkan kali pertama oleh [Aristoteles](http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles) sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan banyak orang (rakyat). Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu [tatanan](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tatanan&action=edit&redlink=1) yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh [negara](http://id.wikipedia.org/wiki/Negara) di [dunia](http://id.wikipedia.org/wiki/Dunia).Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut.

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan [politik](http://id.wikipedia.org/wiki/Politik), baik [langsung](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Langsung&action=edit&redlink=1) maupun [tidak langsung](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tidak_langsung&action=edit&redlink=1) (perwakilan).
2. Adanya [persamaan hak](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Persamaan_hak&action=edit&redlink=1) bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
3. Adanya [kebebasan](http://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan) dan [kemerdekaan](http://id.wikipedia.org/wiki/Kemerdekaan) bagi seluruh warga negara.
4. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Pemikir politik mendefinisikan demokrasi dengan cara yang berbeda. Mereka bisa dikategorikan dalam tiga kelompok.

Kelompok pertama menyatakan bahwa demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan umum.

Kelompok kedua menganggap konsep demokrasi secara luas dan mencari jangkauan untuk memperpanjang bidang ekonomi dan juga sosial.

Sedangkan kelompok yang terakhir memegang bahwa demokrasi adalah filsafat kehidupan, dimana menekankan martabat manusia dan memandang semua kehendak individu.

Dibawah ini akan terdapat penjelasan demokrasi, dimana merujuk kepada kategori kelompok yang pertama.

1. Pemerintahan rakyat.

Bisa dikatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana rakyat memiliki kekuatan penuh didalam politik, baik secara langsung maupun melalui representative.

Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Seely mendefinisikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan bersama.

2. Pemerintahan khalayak ramai.

Menurut pemikir jurusan demokrasi bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang besara atau khalayak ramai. Dicey mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, dimana badan yang memerintah didalamnya adalah pergeseran komparatif yang besar dari seluruh populasi.

Bryce dalam tulisannya; kata demokrasi telah dipakai semenjak masanya Herodotus untuk menunjukkan bahwa bentuk pemerintahan yang didalamnya para penguasa memiliki kekuatan tetap dan secara legal, tetapi kekuasaan tersebut tidak dipegang oleh kelompok khusus atau oknum- oknum lainnya, namun dipegang oleh seluruh komunitas secara keseluruhan.

Jeff Hayness (2000) membagi pemberlakuan demokrasi ke dalam tiga model berdasarkan penerapannya. Ketiganya yaitu demokrasi formal, demokrasi permukaan (fade) dan demokrasi substantif. Ketiga model ini menggambarkan praktik demokrasi sesungguhnya yang berlangsung di negara manapun yang mempraktikkan demokrasi di atas bumi ini.

1. Demokrasi formal ditandai dengan adanya kesempatan untuk memilih pemerintahannya dengan interval yang teratur dan ada aturan yang mengatur pemilu. Peran pemerintah adalah mengatur pemilu dengan memperhatikan proses hukumnya. [Indonesia saya kira termasuk dalam tipe demokrasi ini]

2. Demokrasi permukaan (fade) merupakan gejala yang umum di Dunia Ketiga. Tampak luarnya memang demokrasi, tetapi sama sekali tidak memiliki substansi demokrasi. Pemilu diadakan sekadar para os inglesses ver, artinya "supaya dilihat oleh orang Inggris". Hasilnya adalah demokrasi dengan intensitas rendah yang dalam banyak hal tidak jauh dari sekadar polesan pernis demokrasi yang melapisi struktur politik.

3. Demokrasi substantif menempati rangking paling tinggi dalam penerapan demokrasi. Demokrasi substantif memberi tempat kepada rakyat jelata, kaum miskin, perempuan, kaum muda, golongan minoritas keagamaan dan etnik, untuk dapat benar-benar menempatkan kepentingannya dalam agenda politik di suatu negara. Dengan kata lain, demokrasi substantif menjalankan dengan sungguh-sungguh agenda kerakyatan, bukan sekadar agenda demokrasi atau agenda politik partai semata.

Sedangkan berdasarkan sifatnya, terbagi ke dalam dua jenis yaitu demokrasi bersifat langsung dan demokrasi bersifat representatip.

a. Demokrasi bersifat langsung / Direct Demokrasi.

demokrasi langsung juga dikenal sebagai demokrasi bersih. Disinilah rakyat memiliki kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya, dan semua aspirasi mereka dimuat dengan segera didalam satu pertemuan.

Jenis demokrasi ini dapat dipraktekkan hanya dalam kota kecil dan komunitas yang secara relatip belum berkembang, dimana secara fisik memungkinkan untuk seluruh electorate untuk bermusyawarah dalam satu tempat, walaupun permasalahan pemerintahan tersebut bersifat kecil.

Demokrasi langsung berkembang di Negara kecil Yunani kuno dan Roma. Demokrasi ini tidak dapat dilaksanakan didalam masyarakat yang komplek dan Negara yang besar. demokrasi murni yang masih bisa diambil contoh terdapat diwilayah Switzerland.

Mengubah bentuk demokrasi murni ini masih berlaku di Switzerland dan beberapa Negara yang didalamnya terdapat bentuk referendum dan inisiatip. Dibeberapa Negara sangat memungkinkan bagi rakyat untuk memulai dan mengadopsi hukum, bahkan untuk mengamandemengkan konstitusional dan menetapkan permasalahan public politik secara langsung tampa campur tangan representative.

b. Demokrasi bersifat representatip / Representative Demokrasi.

Didalam Negara yang besar dan modern demokrasi tidak bisa berjalan sukses. Oleh karena itu, untuk menanggulangi masalah ini diperlukan sistem demokrasi secara representatip. Para representatip inilah yang akan menjalankan atau menyampaikan semua aspirasi rakyat didalam pertemuan. Dimana mereka dipilih oleh rakyat dan berkemungkinan berpihak kepada rakyat. ( Garner ).

Sistem ini berbasis atas ide, dimana rakyat tidak secara langsung hadir dalam menyampaikan aspirasi mereka, namun mereka menyampaikan atau menyarankan saran mereka melaui wakil atau representatip. Bagaimanapun, didalam bentuk pemerintahan ini wewenang disangka benar terletak ditangan rakyat, akan tetapi semuanya dipraktekkan oleh para representatip.

Demokrasi kemudian berkembang menjadi sebuah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.